



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Pupuk Subsidi Diincar sejak Perencanaan
Tanggal : Sabtu, 29 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Pupuk Subsidi Diincar sejak Perencanaan

Penyimpangan program pupuk bersubsidi diduga terjadi dari hulu hingga hilir. Dari mulai penyusunan alokasi pupuk yang tak akurat hingga penyelewengan dengan berbagai modus saat pupuk subsidi didistribusikan

BANYUASIN, KOMPAS — Penyimpangan pupuk bersubsidi terjadi sejak awal perencanaan hingga disalurkan ke lapangan. Ada pihak-pihak yang diduga sengaja membuat data tidak akurat dalam penyusunan usulan alokasi pupuk. Penyelewengan berlanjut ke jalur distribusi.

Investigasi harian Kompas di sejumlah daerah mengungkap praktik manipulasi data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RD-KK) tani. RDKK adalah dokumen yang berisi kebutuhan pupuk kelompok tani di setiap daerah. RDKK digunakan untuk menentukan alokasi pupuk subsidi ke setiap daerah. Pada praktiknya, pengisian RDKK sudah dimanipulasi sejak awal. Di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pengecer bekerja sama dengan kelompok tani memanipulasi e-RD-KK. Udin, bukan nama sebenarnya, pengecer di Banyuasin, meminta kelompok tani mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) orang yang meninggal untuk dimasukkan ke dalam e-RD-KK. "Aku cari orang yang meninggal, yang penting ada KTP-nya. Jika ada, dan masih terdaftar di RDKK, bisa buat ambil (pupuk)," kata Udin, Minggu (16/1/2022).

Tahun lalu, ada 37 orang meninggal yang dimasukkan ke e-RD-KK salah satu desa di Banyuasin.

Temuan serupa terjadi di Tuban, Jawa Timur. Sebagian warga, bahkan masih berusia belasan tahun, dimasukkan ke e-RD-KK. Ini terjadi karena validasi data tidak dilakukan dengan ketat.

Di tahap perencanaan, sebagian petani berada di posisi yang pasif. Mereka hanya

(bersambung ke hlm 15 kol 4-5)

pupuk Subsidi Diincar menyeter KTP dan memerca-
yakan proses selanjutnya ke-
pada pengurus kelompok tani
dan penyuluh pertanian la-
pangan (PPL). Di sejumlah da-
erah, petani tidak tahu jatah
pupuk yang diterimanya. "Jadi,
data itu di sana, di distribu-
tornya. Jadi, kami itu tinggal
narik," kata Tarno (56), petani
di Kecamatan Tuntang, Kabu-
paten Semarang, Jawa Tengah.
Manipulasi data RDKK ter-
jadi di hampir semua wilayah
sebagaimana temuan Ombuds-
man Republik Indonesia (RI)
pada Desember 2021. Ada
369.688 warga yang meninggal
dunia yang masuk data awal
e-RDKK tahun 2021.

Dari dokumen Ombudsman
RI tentang kajian malaadmi-
nistrasi tata kelola pupuk ber-
subsidi, terungkap ketidaksesu-
aian data nomor induk kepen-
dudukan (NIK) di Provinsi
Aceh, Sumatera Selatan, dan
Banten. Akibatnya, petani yang
tercantum dalam RDKK seka-
lipun tak mendapatkan pupuk
bersubsidi. Padahal Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 49
Tahun 2020 menyebutkan, pu-
puk bersubsidi hanya untuk pe-
tani yang terdaftar di RDKK.

Menentukan

Menurut anggota Ombuds-
man RI, Yeka Hendra Fatika,
perencanaan memegang peran
penting dalam menentukan ke-
berhasilan program pupuk ber-
subsidi. Data yang tidak akurat
berdampak pada alokasi pupuk
yang tidak tepat sasaran. "Pe-
nyimpangan bisa terjadi ketika
data tidak akurat," kata Yeka.
Di level distribusi, pupuk ber-
subsidi bocor ke jalur tidak res-
mi yang diduga karena peran
oknum-oknum di jalur resmi
bersama pihak lain. Temuan
Kompas di Tuban, Nganjuk (Ja-
tim), Indramayu dan Kabupa-
ten Bandung (Jawa Barat) me-
ngungkap fakta pupuk bersubsidi
dikuasi tengkulak, calo, joki,
serta juragan pupuk. Mereka
semua bukan bagian dari jalur
distribusi resmi.

Berbahaya

Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian (PSP) Ke-
mentan Ali Jamil meyakini, pe-
nyelewengan pupuk subsidi di
beberapa daerah dilakukan sin-
dikat dengan sangatterstruktur,
berbahaya, dan merugikan pe-
tani. "Saya berharap sindikatu
diusut tuntas ke akar-akarnya
dan pelaku dihukum seberat-

beratnya," katanya.

Adapun PT Pupuk Indonesia siap menindak tegas distributor dan kios resmi yang terbukti melanggar prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. "Untuk distributor dan kios, sanksi itu berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin operasi kepada mereka yang terbukti bersalah," kata SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana.

Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta Pupuk Indonesia bertanggung jawab terkait besarnya pupuk subsidi yang mengalir di jalur tak resmi. Sebab, selama ini penunjukan distributor dan kios berada dalam wewenang Pupuk Indonesia. "Kami sudah berulang kali meminta evaluasi per tahun kepada distributor dan kios resmi itu," katanya di Jakarta, Kamis (27/1).

Terkait hal itu, Sudin mengatakan akan memanggil Direksi Pupuk Indonesia. Ia juga meminta agar pendataan RDKK diperketat, pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida diperkuat dengan anggaran memadai, serta penerapan prioritas daerah dan komoditas terhadap pengucuran pupuk bersubsidi. (DVD/FAI/IRE/RAM/NDY)